



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 12 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Bungo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang..... 2

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BUNGO.**

Pasal I

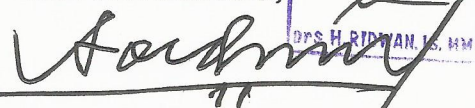
Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 5, sehingga lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 6 - 10 - 2015

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 24.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR
TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG AKSI
DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BUNGO

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015

NO.	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B07, B09, B12	% CAPAIAN	KEITERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
PENCEGAHAN								
Reformasi Layanan Perizinan di Kabupaten Bungo								
1	Pelimpahan seluruh kewenangan pemberian izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pemerintah Kabupaten Bungo	BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP	1 Diterbitkan dan disosialisasinya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan seluruh kewenangan pemberian izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP.	B07: Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD Tahun 2015 B09: Tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015 B12 Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan Non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015		B07: Daftar hadir, surat undangan dokumentasi kegiatan B09: Scan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015 B12 Scan Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015 Surat Undangan sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan.
2	Tersedianya mekanisme Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)					B07 Tertaksananya pertemuan koordinasi untuk menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi B09 Tersusunnya rancangan mekanisme monitoring dan evaluasi B12 Tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)		B07 Scan daftar hadir, undangan, dokumentasi kegiatan B09 Scan rancangan mekanisme monitoring dan evaluasi B12 Scan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

NO.	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B07, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Pemerintah Kabupaten Bungo	- Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo - Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	1 Terpublikasinya melalui <i>Website</i> masing masing pemerintah daerah, yaitu : 1 Ringkasan rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) 2 Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-PPKD) 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 4 Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 6 Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7 Ringkasan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 8 Ringkasan Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) 9 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh SKPD 10 Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah LRA-PPKD 11 Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah audit 12 Opini atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD)	B07: Tertindakannya rapat koordinasi terkait peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah. B09 Dipublikasikannya Ringkasan RKA-SKPD, ringkasan RKA-PPK, Rancangan Perda tentang APBD, Perda tentang APBD, Rancangan perda tentang perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD hasil audit, opini atas LKPD pada website Pemerintah daerah B12 Tersedianya laporan Kegiatan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah		B07: Daftar hadir, surat undangan dokumentasi kegiatan B09 Print Screen dan Link Website B12 Scan Laporan

NO.	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B07, B09, B12		% CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6		7	8
3	Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Bungo	Bappeda Kabupaten Bungo	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen rencana satuan kerja perangkat daerah (Rencana Strategis (Renstra)SKPD dan Rencana Kerja (RENUA) SKPD	1 Terpublikasikannya melalui website masing-masing pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, yaitu : Rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta	B07 Tertaksananya rapat koordinasi terkait publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah	B09 Dipublikasikannya Rencana Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) serta Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD dan RENUA SKPD) Website pemerintah daerah	B07 Daftar hadir, Surat undangan, dokumentasi kegiatan	B09
4	Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu	Pemerintah Kabupaten Bungo	Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo	Terlaksananya kewajiban pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait pembentukan infastuktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya	2 Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD)	B12 Tersedianya laporan kegiatan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	B12 Scan Laporan	B07: Scan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan PPID	B09 Scan SK Kepala Daerah tentang SOP pelayanan Informasi publik
						B07: Terbentuknya PPID Melalui SK Kepala Daerah			B12 Print screen dan link website
						B09 Diterbitkannya SK Kepala Daerah tentang SOP pelayanan informasi publik			

Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Publik

5	Pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Pemerintah Kabupaten Bungo	- Bagian Pembangunan dan Keuangan Setda Kabupaten Bungo - Bagian Humas Setda Kabupaten Bungo	Meningkatnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	1) Pelaksanaan Pengembangan Kelenbagaan, sumber daya manusia dan tata kelola unit layanan pengadaan (ULP) (Hanya untuk pemerintah provinsi)	B07: ikut serta dalam sosialisasi tingkat kemalangan ULP (Difasilitasi Bappenas, Kemendagri dan LKPP) B09 Tersedianya hasil slef assesment tingkat kenatangan organisasi ULP B12 Tersusunnya roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP	B07: Bukti kehadiran, dokumentasi, hasil kegiatan B09 Hasil Assesment (form assesment yang telah diisi yang dilengkapi dengan dokumen) B12 Roadmap peningkatan kematangan organisasi ULP
---	---	----------------------------	--	---	---	---	---

NO.	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B07, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
					2) Diumumkan rencana umum pengadaan di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) agar dapat dilaksanakan konsolidasi	B07: Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) pelaksanaan RUP semester I TA 2015 B09 1 Draft RUP TA 2016 2 Penayangan RUP K/L/D/I Perubahan TA 2015		B07: Dokumen Laporan Monev RUP semester I TA 2015 B09 1 Dokumen Draft RUP TA 2016 2 Link RUP APBN-P TA 2015 dari Aplikasi SIRUP
						B12 Penayangan RUP TA 2016 Laporan Monev Pelaksanaan RUP Semester II TA 2015		B12 1 Link RUP TA 2016 dari Aplikasi SIRUP 2 Dokumen Laporan Monev RUP Semester II TA 2015
						B07: Terbunya Surat Edaran Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tentang kewajiban pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan kerja masing-masing yang dipublikasikan melalui web K/L/D/I		B07 1. Surat edaran kepada satuan kerja di bawahnya 2. Link download/screen capture penayangan surat edaran
					3) Terlaksananya seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	B09 1 LPSE DI K/L/D/I memenuhi Standar LPSE : 2014 (minimal 6 standar) 2 K/L/D/I memastikan terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui SPSE 3 Terbentuknya LPSE dimasing-masing pemerintah Daerah 4 Terlaksananya pelatihan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukungnya kepada PPK, pejabat Pengadaan dan ULP di masing-masing K/L/D/I 5 Terlaksananya pelatihan aplikasi SPSE dan aplikasi pendukung lainnya terutama sistem informasi kinerja penyedia kepada penyedia di masing-masing K/L/D/I 6 LPSE di K/L/D/I memiliki SOP Registrasi dan Verifikasi kepada penyedia		B09 1 Sertifikat standar LPSE : 2014 2 Screen Capture Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui Aplikasi SPSE 3 Sk Tim Pembentukan LPSE 4 Bukti Pelaksanaan Kegiatan (Undangan, Daftar hadir, notulensi, dokumentasi kegiatan, dll) 5 Bukti Pelaksanaan Kegiatan (Undangan, Daftar hadir, notulensi, dokumentasi kegiatan, dll) 6 Dokumen SOP Registrasi dan Verifikasi Kepada Penyedia
						B12 Terlaksananya 100% Pengadaan Barang/jasa Pemerintah melalui SPSE		B12 Laporan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui SPSE

NO.	A K S I	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B07, B09, B12		% CAPAIAN	KETERANGAN (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6		7	8
6	Penyederhanaan perizinan dan sisi jumlah persyaratan waktu, maupun prosedur perizinan di daerah	Pemerintah Kabupaten Bungo	BPMD dan PPT Kabupaten Bungo	Optimalisasi pelaksanaan terkait penyederhanaan perizinan melalui penyediaan standard Operating Procedure (SOP) perizinan pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kabupaten/Kota	Tersedianya dan disosialisasikannya SOP Perizinan pada Lembaga PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota	B07: Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan SOP perijinan pada Lembaga PTSP			B07: Scan rancangan peraturan kepala daerah tentang SOP perijinan pada lembabg PTSP
						B09: Tersusunnya rancangan peraturan kepala daerah tentang SOP perijinan pada lembaga PTSP			B09: Scan rancangan peraturan kepala daerah tentang pelimpahan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP Tahun 2015
						B12: Diterbitkannya peraturan kepala daerah tentang SOP Perijinan pada lembaga PTSP			B12: Scan rancangan peraturan kepala daerah tentang SOP perijinan pada lembaga PTSP
						- Terlaksananya sosialisasi SOP perijinan pada lembaga PTSP			- daftar hadir, surat undangan, dokumentasi kegiatan

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

